



**PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
NOMOR : 188.342/ 26 KEP-DPRD/XI/2024**

**T E N T A N G
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN
2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai penyusunan program pembentukan Peraturan daerah kota dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota;
 - b. bahwa penyusunan Promperperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 101).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib;
 2. Keputusan DPRD Kota Serang Nomor 188.342/ 21KEP-DPRD/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD Kota Serang Untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 3. Berita Acara kesepakatan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang untuk Propemperda Tahun 2025 tanggal 19 November 2024;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Serang Tanggal 20 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD Kota Serang untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- KEDUA :** Skala Prioritas Program Pembentukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini;

- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah yang belum selesai dilakukan pembahasan diajukan kembali dalam propemperda Tahun 2025 untuk dilakukan pembahasan;
- KEEMPAT** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana pada diktum KETIGA adalah 26 (Dua Puluh Enam) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) keputusan ini;
- KELIMA** : Dalam keadaan tertentu, DPRD Kota Serang atau Pemerintah Daerah Kota Serang dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Serang;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Lampiran I : Keputusan DPRD Kota Serang
 Nomor : 188.342/ 26 Kep-DPRD/XI/2024
 Tanggal : 20 November 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI	TARGET PENYAMPA IAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELA SAN/KET ERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	BARU			NA	-	BAPEMPERDA	2025	TW I

			sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011.								
2	PERDA	Pengarustamaan Gender	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun	BARU			NA		BAPEMPERDA	2025	TW I

			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011.								
3	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Visi misi program prioritas pembangunan.	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	NA		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	2025	TW II

[illegible]

						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.					
4	PERDA	Pemajuan Kebudayaan	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	BARU			NA		KOMISI I	2025	TW II
5	PERDA	Pertanggungjawabann Pelaksanaan Anggaran	Penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun			Badan Pengelolaan Keuangan	2025	TW II

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.			2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang			dan Aset Daerah		
--	--	---	---	--	--	---	--	--	-----------------	--	--

					Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.						
6	PERDA	Pengelolaan Limbah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	BARU			NA		BAPEMPERDA	2025	TW III

			Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.								
7	PERDA	Penyelenggaraan	1. Undang-undang	BARU			NA		BAPEMPERDA	2025	TW III

Kesehatan Hewan

- Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

			5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.								
8	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan : - adanya perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; - program kegiatan atau subkegiatan yang dikurangi; - capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus ditingkatkan.	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	TW III

						Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.					
9	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan kemampuan daerah, yang merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	TW IV

Lampiran II : Keputusan DPRD Kota Serang
 Nomor : 188.342/ 26 Kep-DPRD/XI/2024
 Tanggal : 20 November 2024

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BELUM SELESAI

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA							DPRD		Tahun 2018
2	PERDA	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN							DPRD		Tahun 2019
3	PERDA	PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN							DPRD		Tahun 2019
4	PERDA	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG							WALIKOTA		Tahun 2019
5.	PERDA	KEWIRAUSAHAAN PEMUDA							DPRD		Tahun 2020
6.	PERDA	PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH							DPRD		Tahun 2020
7.	PERDA	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT							DPRD		Tahun 2020
8.	PERDA	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH							DPRD		Tahun 2020
9.	PERDA	PENYELENGGARAAN KESEHATAN							DPRD		Tahun 2021
10.	PERDA	KERJASAMA DAERAH							DPRD		Tahun 2021
11.	PERDA	RENCANA PEMBANGUNAN							DPRD		Tahun 2021

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		INDUSTRI KOTA									
12.	PERDA	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN							DPRD		Tahun 2021
13.	PERDA	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SERANG							DPRD		Tahun 2022
14.	PERDA	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							DPRD		Tahun 2022
15.	PERDA	PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TERPADU							DPRD		Tahun 2022
16.	PERDA	SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK							DPRD		Tahun 2022
17.	PERDA	KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI							DPRD		Tahun 2022
18.	PERDA	KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO							DPRD		Tahun 2022
19.	PERDA	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP							WALIKOTA		Tahun 2022
20.	PERDA	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA							DPRD		Tahun 2022

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21.	PERDA	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN							DPRD		Tahun 2022
22.	PERDA	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK							DPRD		Tahun 2023
23.	PERDA	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN							DPRD		Tahun 2023
24.	PERDA	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN							DPRD		Tahun 2023
25.	PERDA	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG							WALI KOTA		Tahun 2024
26	PERDA	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK							DPRD		Tahun 2024

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

